

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

**Perbanas
Perangi
Penjahat Siber**

**Optimistis,
meski Dibayangi
Ketidakpastian**



**Ekonomi Hijau,
Butuh Komitmen dan Keseriusan**



PENERBIT

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Wakil Ketua Umum

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Wakil Sekretaris Jenderal

REDAKTUR PELAKSANA

Eka Sri Dana Afriza

SIRKULASI

Wara Sri Indriani

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari
pihak luar. Panjang tulisan 3.000–
6.500 karakter.

TARIF IKLAN

Cover

Depan dalam dan belakang
dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan
iklan dalam bentuk laporan
keuangan, *display* produk, dan
suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Kesempatan, Bukan Ancaman

Albert Einstein, ilmuwan yang lahir di Ulm, Wurttemberg, Jerman, pada 14 Maret 1879, pernah mengungkapkan sebuah kalimat bijak, “*In the mids of every crisis lies great opportunity.*” Meski sulit memaknainya, setidaknya ungkapan ini menjadi titik terang bagi mereka yang meyakini cara berpikir positif dalam menjalani hidup.

Sebagian besar orang di dunia bisa jadi tidak menyangka bakal menghadapi situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Ketika virus tersebut masih menginfeksi warga Wuhan, Tiongkok, dan mengharuskan pemerintah setempat menutup kota, masyarakat dunia hanya mengikuti beritanya melalui media massa. Situasi menjadi berbeda ketika virus tersebut sudah menyebar ke beberapa belahan bumi karena mobilitas manusia di zaman modern tak bisa dibatasi.

Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah di beberapa negara membatasi kegiatan warganya. Mereka diwajibkan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Beberapa bulan pembatasan itu membuahkan hasil. Jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 bisa ditekan. Beberapa negara pun kembali melonggarkan kegiatan masyarakatnya. Kondisi perekonomian yang menurun akibat pembatasan itu menjadi pertimbangan hampir seluruh pemerintah negara di dunia untuk melonggarkan kegiatan masyarakat. Kendati, di beberapa wilayah angka COVID-19 kembali melonjak ketika pelonggaran itu diterapkan.

Pro dan kontra antara pertimbangan perekonomian dan alasan kesehatan muncul di kalangan masyarakat. Seorang akademisi dari perguruan tinggi ternama di Indonesia mengatakan bahwa saat ini tidak mungkin sebuah kebijakan berdiri sendiri dan hanya mengutamakan satu sektor tanpa memperhitungkan sektor lainnya. Mereka yang memiliki kepentingan di sektor perekonomian tentu memprioritaskan sektor ini. Demikian pula halnya dengan sektor kesehatan.

Pandemi menjadi masalah atau ancaman di satu sisi, tapi bisa menjadi kesempatan untuk mereka yang pandai membaca peluang. Sebagian besar orang meyakini bahwa 2022 menjadi poin bangkitnya warga dunia dari penurunan akibat pandemi. Meski, diakui, potensi munculnya varian baru COVID-19 pasti ada. Namun, peluang menemukan vaksin untuk menguatkan imunitas tubuh dan melawan jasad renik tersebut juga pasti ada. Masyarakat pun sudah terbiasa dengan menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan.

Dunia memang berubah dengan cepat. Dan, perubahan itu harus disikapi dengan bijak. Satu hal yang bergerak sangat cepat adalah teknologi. Pandemi menjadi momentum pelaku bisnis untuk melakukan transformasi layanannya ke arah teknologi digital. Namun, munculnya kejahatan di dunia maya juga harus dicermati.

Seorang bankir sebuah bank besar di Tanah Air mengingatkan bahwa penjahat di dunia maya makin hari makin pintar saat melakukan kejahatan siber. Ilmu mereka pun makin canggih seiring dengan berkembangnya teknologi.

Di dunia modern yang penuh dinamika dan ketidakpastian, keterampilan mengambil keputusan dengan cepat harus diasah dalam semua aspek kehidupan. Semua hal terkait risiko harus diantisipasi lebih awal. Ingat bahwa kesempatan dan ancaman selalu hadir bersama-sama dalam situasi apa pun. Tinggal menentukan, mau pilih kesempatan atautkah ancaman. ■



Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Optimistis, meski Dibayangi Ketidakpastian.....3
 Sejumlah tantangan masih akan dihadapi pelaku industri jasa keuangan pada 2022. Pandemi yang belum pasti kapan berakhir serta dinamika global masih menghadirkan ketidakpastian. Namun, pelaku industri punya optimisme tinggi bahwa kondisi 2022 akan lebih baik daripada 2021.



Aktualita

Awat, Kejahatan Siber Makin Canggih7
 Transformasi digital yang berjalan cepat meningkatkan risiko serangan siber terhadap perbankan. Bank perlu menjalankan pengamanan ekstra jika sistemnya tak ingin dijebol penjahat siber. Yang perlu dicermati, penjahat siber makin lihai menjalankan aksinya.

Indra Utoyo,
 Direktur Digital dan TI BRI dan Ketua Bidang Operation, Technology, dan Regulatory Reporting Perbanas
Perbanas Perangi Penjahat Siber8



Menakar Potensi Ekonomi Syariah Setelah Pemulihan Ekonomi 202210

Ekonomi Hijau, Butuh Komitmen dan Keseriusan12
 Kebutuhan investasi hijau saat ini masih cukup besar. Kontribusi antara regulator dan swasta dibutuhkan untuk menyukseskan transisi energi dan mendorong perekonomian hijau. Pembiayaan perbankan serta dukungan regulator memainkan peran vital.

Merancang Organisasi Masa Depan.....14
 Bertahan dalam situasi yang berubah begitu cepat dan penuh ketidakpastian memang bukan hal yang mudah. Semua perusahaan atau organisasi tentu ingin bisa bertahan, bahkan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Apa saja yang perlu dilakukan supaya menjadi perusahaan atau organisasi masa depan?



Agar Lebih Melek dan Cerdas Berkeuangan16

Indikator

Jaga Momentum, Restrukturisasi Kredit Diperpanjang18
 Program restrukturisasi kredit resmi diperpanjang OJK hingga Maret 2023. Pelaku perbankan menyambut baik hal itu dan diharapkan dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Internasional

Hubungan Dagang Indonesia-Nigeria: Dari Minyak Bumi hingga “Indomie”20

Regulasi

Jalan Pintas Menuju Transformasi Digital22
 Untuk menciptakan industri perbankan yang lebih kompetitif, regulator merilis peraturan tentang bank umum dan produknya pada Juli 2021. Peraturan ini sesuai dengan kebutuhan bank dan masyarakat yang sudah beralih ke layanan digital.



Menyelaraskan dengan Praktik Bisnis Internasional.....24

Suplemen

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
 - Jotun.....6
 - MUFG Bank.....17
 - Bank Syariah Indonesia.....23



Optimistis, meski Dibayangi Ketidakpastian

Sejumlah tantangan masih akan dihadapi pelaku industri jasa keuangan pada 2022. Pandemi yang belum pasti kapan berakhir serta dinamika global masih menghadirkan ketidakpastian. Namun, pelaku industri punya optimisme tinggi bahwa kondisi 2022 akan lebih baik daripada 2021.

Laju perekonomian Indonesia sangat terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang sudah berlangsung selama hampir dua tahun. Namun, Indonesia dinilai banyak kalangan mampu menjaga kinerja ekonomi dengan relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia.

Kinerja ekonomi dunia, termasuk Indonesia, pada 2021 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 2020. Meski pandemi COVID-19 belum usai, roda perekonomian mulai bergerak ke arah pemulihan. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat mulai meningkat. Ekonomi dunia pun diproyeksi mulai tumbuh positif, setelah tumbuh minus pada akhir 2020.

Memasuki 2022, meski masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi, banyak kalangan optimistis bahwa kondisi 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan 2021. Vaksinasi yang dilakukan secara agresif diyakini akan membentuk *herd immunity* atau kekebalan kelompok. Di samping itu, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan tengah berupaya bangkit dari tekanan pandemi. Tren pemulihan ekonomi yang sudah *on the track* diyakini akan terus berlanjut pada 2022. Pemerintah pun percaya diri mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,2% sampai dengan 5,8% hingga akhir 2022.

Meski begitu, ada beberapa tantangan yang harus tetap diwaspadai. Sebut saja, pandemi COVID-19 yang belum usai.

Bahkan, kemunculan varian baru (Omicron) memicu lonjakan kasus baru COVID-19 di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Ini menimbulkan kekhawatiran akan kembali dilakukannya pengetatan, yang pada akhirnya akan berimbas pada aktivitas perekonomian. Di lain sisi, dinamika global juga harus dicermati.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam *press conference* APBN Kita pada medio Desember 2021, paling tidak ada tiga ancaman terhadap perekonomian Indonesia 2022. Satu, adanya Omicron. Dua, kemungkinan *tapering off* yang akan dilakukan The Fed, bank sentral Amerika Serikat (AS). Normalisasi kebijakan dengan langkah mengurangi stimulus tersebut bisa jadi dilakukan The Fed, mengingat perekonomian AS mulai membaik. Ini salah satunya tecermin dari tingkat inflasi yang menyentuh level 6,8% atau tertinggi sepanjang sejarah Negeri Paman Sam itu. Tiga, persoalan krisis rantai pasok yang mulai membaik dan akan memicu inflasi.

Karena itu, Sri Mulyani mengingatkan agar Indonesia tetap waspada. “Dinamika ekonomi global, baik ekspor, impor, inflasi, nilai tukar rupiah, dan komoditas,” imbuh wanita yang karib disapa Ani tersebut.

Sedangkan, Bank Indonesia (BI) menyebut ada lima tantangan pemulihan ekonomi Indonesia pada 2022. Yakni, 1) normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global, 2) dampak pandemi terhadap dunia korporasi dan sistem keuangan, 3) meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto, 4)

tuntutan ekonomi hijau, 5) kesenjangan untuk perlunya inklusi ekonomi.

Namun, BI tetap optimistis Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan 2021. BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%. Kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, dan investasi akan menjadi penopang ekonomi nasional pada 2022.

Tren pemulihan ekonomi juga akan berdampak pada kinerja sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya. Selama pandemi COVID-19 sektor perbankan dan jasa keuangan mengalami tekanan yang luar biasa. Permintaan kredit merosot. Banyak debitur, baik korporasi maupun perorangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis ataupun pendapatannya terdampak pandemi sehingga kemampuan membayar angsurannya menurun.

Industri perbankan dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*) pun melakukan restrukturisasi besar-besaran. Restrukturisasi yang diatur regulator lewat kebijakan *countercyclical* tersebut memang mampu menjaga kualitas aset perbankan dan perusahaan pembiayaan. Sejauh ini angka kredit atau pembiayaan bermasalah terjaga di bawah *threshold* yang ditetapkan regulator.

Banyak pelaku industri jasa keuangan meyakini bahwa 2022 adalah waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi. Aktivitas ekonomi kembali menggeliat. Masyarakat juga sudah lebih percaya diri untuk melakukan *spending*. Permintaan kredit diprediksi akan mengalami kenaikan. Para pelaku

Tren pemulihan ekonomi juga akan berdampak pada kinerja sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya. Selama pandemi COVID-19 sektor perbankan dan jasa keuangan mengalami tekanan yang luar biasa. Permintaan kredit merosot.

usaha pun tentu membutuhkan modal kerja maupun investasi untuk memacu bisnisnya.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2021, kondisi sektor jasa keuangan terbilang stabil. Kinerjanya menunjukkan tren perbaikan seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai pulih. OJK pun sudah menyiapkan sejumlah fokus kebijakan utama untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan sistem keuangan.

“Rencana kebijakan tersebut sejalan dengan upaya OJK untuk terus berperan aktif dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh kuat, mampu menciptakan kesempatan kerja luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia,” papar Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Desember 2021.

Sektor jasa keuangan sendiri, khususnya perbankan, terbilang mempunyai daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Fundamental industri yang kuat serta dukungan dari bermacam bauran kebijakan regulator membuat kondisi perbankan nasional tetap stabil.

Meski kinerjanya tertekan, perbankan mempunyai fondasi yang cukup kuat. Dari sisi permodalan, misalnya, perbankan nasional punya modal yang kuat dengan rasio *capital adequacy ratio (CAR)*

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 (Dalam Persen)

			
5,9	5	5,2-5,8	4,8

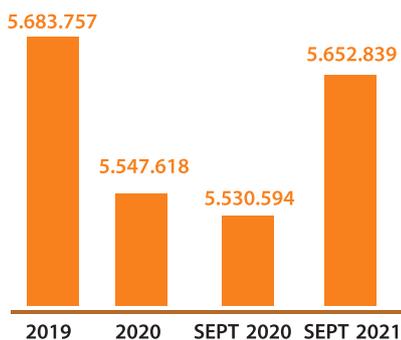
Sumber: dari berbagai sumber

KINERJA PERBANKAN NASIONAL 2019 - 2021 (Rp Miliar)

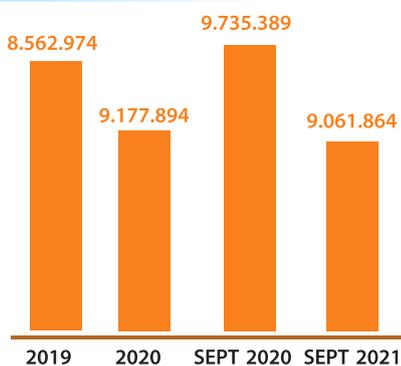
Dana Pihak Ketiga (DPK)



Kredit



Aset



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

di level 25,62% per November 2021. Kredit perbankan juga sudah berada dalam tren positif. OJK mencatat, pada November 2021 penyaluran kredit perbankan tumbuh 4,82% secara tahunan. Kualitas kredit pun terjaga dengan *non performing loan (NPL)* net

di posisi 0,98% dan *NPL gross* di posisi 3,19%. Sedangkan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh solid 10,48% secara *year on year (yoy)*.

Kinerja industri perbankan diyakini makin membaik pada 2022. Optimisme tinggi diutarakan Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini percaya bahwa daya beli masyarakat yang mulai kembali pulih akan menjadi katalis positif bagi perbankan.

BRI pun mengincar pertumbuhan kredit di kisaran 8%-10% pada 2022. BRI masih akan mengandalkan segmen UMKM yang selama ini menjadi *backbone*-nya dalam memacu pertumbuhan. Ekspansi kredit akan tetap diimbangi dengan mengedepankan *selective growth*. Selain itu, prinsip kehati-hatian akan tetap diprioritaskan, mengingat ketidakpastian masih membayangi.

Perbaikan kinerja juga tampak di industri keuangan nonbank (IKNB). Industri asuransi, misalnya. Sisi permodalan industri ini terlihat kokoh. Per Oktober 2021 *risk based capital (RBC)* asuransi jiwa ada di posisi 605,89%, sedangkan asuransi umum dan reasuransi ada di posisi 352,02%, jauh di atas *threshold* yang ditetapkan regulator yang minimal 120%. Dari sisi premi, asuransi umum mencatat pertumbuhan 7,9% *yoy*, sedangkan asuransi jiwa masih terkoreksi tipis 0,2% (*yoy*).

Pada 2022 Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memprediksi pendapatan premi industri akan tumbuh *single digit*. Pertumbuhan akan ditopang beberapa lini bisnis, seperti asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit. Sementara, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) optimistis kinerja industri akan membaik. AAJI membidik pertumbuhan premi hingga *double digit* pada 2022.

Industri *multifinance* juga mulai membaik. Berdasarkan data OJK, per November 2021 piutang pembiayaan masih tumbuh minus 3,5% menjadi Rp362,52 triliun. Namun, secara *month to month*, sudah tumbuh positif 0,99%. Ini menggembirakan karena pertama kalinya piutang pembiayaan tumbuh

Banyak pelaku industri jasa keuangan meyakini bahwa 2022 adalah waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi. Aktivitas ekonomi kembali menggeliat. Masyarakat juga sudah lebih percaya diri untuk melakukan spending. Permintaan kredit diprediksi akan mengalami kenaikan.

positif secara *month to month* sejak pandemi COVID-19 melanda.

Insentif untuk sektor otomotif, seperti diskon PPNBM, berhasil mendongkrak penjualan mobil baru. Industri *multifinance* pun mendapat dampak positif dari kebijakan tersebut. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, para pelaku industri *multifinance* yakin bahwa pada 2022 piutang pembiayaan akan kembali tumbuh positif.

Tren Perkembangan Kredit dan DPK Perbankan

Memang belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Namun, industri sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, sudah berada dalam momentum positif untuk menjaga pertumbuhan. Pada 2022 kinerja perbankan diyakini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren pemulihan ekonomi akan

Banyak pelaku industri jasa keuangan meyakini bahwa 2022 adalah waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi. Aktivitas ekonomi kembali menggeliat. Masyarakat juga sudah lebih percaya diri untuk melakukan spending.



Perry Warjiyo; ekspansi kredit terpicu

mendorong sektor riil kembali menggeliat. Permintaan kredit pun diprediksi akan kembali meningkat. BI memproyeksi kredit perbankan nasional akan tumbuh di kisaran 6%-8% pada 2022. Sedangkan, DPK diperkirakan meningkat di kisaran 7%-9%.

Dalam gelaran Bank Indonesia Bersama Masyarakat (Biram) 2021, pada awal Desember 2021, Gubernur

BI, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa permintaan pembiayaan yang mulai pulih dan likuiditas perbankan yang melimpah akan memicu ekspansi kredit pada 2022. "Insyaallah pertumbuhan kredit di kisaran 6% sampai 8%," kata Perry.

BI pun tak akan terburu-buru menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit. BI bahkan mendorong penurunan lebih lanjut pada suku bunga kredit perbankan.

Berbagai sektor perekonomian tengah mengalami tren pemulihan untuk keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Tren ini antara lain tecermin dari mulai tumbuhnya permintaan kredit di berbagai segmen, termasuk korporasi dan UMKM. Sektor-sektor yang siap mendongkrak kredit perbankan antara lain perkebunan, kimia-farmasi, hortikultura, makanan dan minuman, serta pertambangan biji logam.

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan kredit perbankan pada 2022 tumbuh di kisaran

5,1%-8,9%. Sedangkan, DPK diproyeksi mengalami kenaikan sekitar 8,5% sampai dengan 9,4%.

Mengacu pada data OJK, per September 2021 kredit bank umum mencapai Rp5.652,84 triliun, naik 2,21% dari Rp5.530,59 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi kredit tersebut masih didominasi kredit modal kerja dengan pangsa 45,57%, setara dengan Rp2.575,99 triliun. Sedangkan, kredit investasi dan konsumsi masing-masing tercatat 26,41% (Rp1.492,91 triliun) dan 28,01% (Rp1.583,36 triliun).

Sementara, DPK tercatat mengalami kenaikan 7,69% menjadi Rp7,162,29 triliun dari Rp6,650,88 triliun. Perinciannya, sebesar Rp1.982,29 triliun bersumber dari giro, Rp2.294,71 triliun dari tabungan, dan Rp2.885,28 triliun dari deposito. Dengan kata lain, dana masyarakat yang dihimpun perbankan didominasi dana murah alias *current account/saving account (CASA)* sebesar Rp4.277 triliun atau 59,71% dari total DPK. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. JOTUN INDONESIA

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPH tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PT Jotun Indonesia, NPWP No. 01.071.174.5-052.000 yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok KK-1 Jatiwangi, Cikarang Barat Bekasi, dengan ini mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun buku 2021 sebesar Rp. 2.626.571.662,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA DEBITUR	NPWP	ALAMAT	PLAFON UTANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
BUT.SHANDONG TIANYUAN INSTALLATION ENGINEERING CO.,LTD	03.319.213.9-053.000	APARTEMEN MEDITERANIA BOULEVARD UNIT R/OR/G JL. LANDAS PACU UTARA SELATAN KAV.2 BLOK A1 KEBON KOSONG, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT 10630	100.000.000	42.702.000
CV. DWI MITRA Cipta Abadi	02.825.214.6-604.000	JL. LONTAR INDAH 09 PA XI-06 RT.002 RW.015 LONTAR SAMBIKREPE, SURABAYA	75.000.000	65.502.360
CV. ILYAS MANDIRI	74.666.283.2-403.000	PESONA KYOTO BOULEVARD KOTA WISATA BLOK D2 NO.2 NAGRAK GUNUNG PUTRI BOGOR, JAWA BARAT	250.000.000	213.887.000
CV. MITRA PILAR UTAMA	75.114.406.4-447.000	JL. KAWI A NO.12 SKU RT.005 RW.014 JATIMAKMUR, PONDOK GEDE, KOTA BEKASI - JAWA BARAT	50.000.000	9.889.000
KARSHANA MARDI PRATAJA	17.135.524.1-615.000	KUTISARI INDAH SELATAN 1/147 KUTISARI TENGGILIS MEJOYO SURABAYA JAWA TIMUR 60291	50.000.000	18.964.000
PT. DEHA SEJAHTERA	31.248.493.4-526.000	JL. DUKU I GG MASJID AMANAH NO.9 RT03 RW.04 JAJAR, LAWHEYAN - SURAKARTA	100.000.000	55.779.899
PT. GANSA FURINDO	01.084.733.3-431.000	JL. AKASIA II BLOK A 9 NO. 1-2 DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK, LIPPO CIKARANG, BEKASI	1.000.000.000	924.456.780
PT. HASTALINDO PRIMA UTAMA	72.906.817.1-085.000	TAMAN PALEM LESTARI CC I NO.1 RT.RW. KEL. TEGAL ALUR KEC.KALIDERES, JAKARTA BARAT	100.000.000	87.714.000
PT. HUNIPERSADA CITRANUSA	01.654.024.7-046.000	JL. GRIYA AGUNG NO.59 INDONESIA	100.000.000	32.841.288
PT. KARYA SEJAHTERA KONTRAKTOR	74.016.227.6-451.000	KP. BABAKAN TENGAH RT.003 RW.002 BABAKAN, LEGOK KAB.TANGERANG BANTEN	150.000.000	98.335.975
PT. LASER METAL MANDIRI	02.198.576.7-431.000	INDUSTRI CIKARANG KOMPKWS.SARANA TERPADU, PASIR GAMBONG, CIKARANG UTARA, BEKASI	100.000.000	43.949.700
PT. MESHINDO ALLOY WHEEL	01.497.549.4-631.000	JL. MARGOMULYO INDAH I KAV 8-9 BALONGSARI, TANDES, SURABAYA - JAWA TIMUR 60186	100.000.000	53.334.860
PT. MITRA PALMIL	03.040.449.5-041.000	KOMPRUKO PERMATA KOTA BLOK.K-5 JL.P.TUBAGUS ANGKE 170 PEJAGALAN, PENJARINGAN JAKARTA UTARA	350.000.000	329.142.000
PT. PANJALU TRI TUNGGAL	01.743.747.6-643.000	DESA WADUNGASIH RT 004 RW 001 WADUNGASIH BUDURAN -SIDOARJO 61252	100.000.000	79.824.800
PT. REJEKI INTILOGAM JAYA	01.821.771.1-415.000	KP. CISEREH JL. VETERAN NO.19 KADU JAYA - CURUG TANGERANG	100.000.000	38.410.000
PT. SARIJATI ADHITAMA	01.328.711.5-007.000	JL. DANAU INDAH RAYA BLOK AI/15 RT.006 RW.011 SUNTER JAYA, TANJUNG RIOK - JAKARTA UTARA	600.000.000	531.838.000
JUMLAH				2.626.571.662

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Perusahaan yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dan daftar tersebut akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak PMA I, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan sebagai lampiran.

Awas, Kejahatan Siber Makin Canggih

Transformasi digital yang berjalan cepat meningkatkan risiko serangan siber terhadap perbankan. Bank perlu menjalankan pengamanan ekstra jika sistemnya tak ingin dijebol penjahat siber. Yang perlu dicermati, penjahat siber makin lihai menjalankan aksinya.

Menurut data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), selama pandemi terdapat lebih dari 1 miliar anomali trafik atau serangan siber dalam kurun waktu Januari hingga September 2021. Itu berarti, dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan 2020. Meningkatnya kejahatan siber juga membawa ancaman bagi dunia perbankan, seperti virus, *spam*, *hacking*, *phising*, *secure*, dan *trojan*.

Pratama Persadha, Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC, mengatakan bahwa ada sejumlah masalah terbesar yang dihadapi perbankan saat ini, yaitu tersedianya jaringan WiFi publik yang merupakan salah satu cara mudah bagi peretas untuk mendapatkan akses dan data dari berbagai informasi akun yang tersimpan di *smartphone*, serangan *mobile malware*, dan aplikasi pihak ketiga. “*Smartphone* dan tablet mungkin memiliki keamanan yang lemah jika dibuat oleh pengembang yang tidak berpengalaman,” katanya.

Pratama menambahkan, perlu ada perlindungan lebih bagi nasabah dan pegawai bank agar tidak menjadi celah keamanan di bank. *Behaviour* dan *awareness* nasabah serta pegawai bank menjadi hal penting. Karena kurangnya pengetahuan, misalnya, nasabah dapat dengan mudah masuk ke aplikasi perbankan melalui jaringan yang tidak aman, atau mengunduh aplikasi pihak ketiga, bahkan mengklik sembarangan *email phishing*. Bank perlu menemukan cara untuk melindungi nasabah serta pegawainya.

“Upaya manipulasi dan segala macam serangan harus direspons dengan kewaspadaan seluruh lembaga perbankan swasta dan negara. Keberhasilan serangan dan manipulasi pada sistem akan meningkatkan ketidakpercayaan publik kepada perbankan. Sebab, dampak dari kebocoran data pada industri perbankan di antaranya *reputation loss*, *financial loss*, *intellectual property loss*, *legislative breaches leading to legal actions (cyber law)*, *loss of customer confidence*, dan *service interruption costs*,” tambah Pratama.

Kejahatan siber yang makin masif juga mendorong Perbanas sebagai asosiasi industri perbankan di Indonesia, mengambil langkah yang terintegrasi untuk meminimalkan serangan kejahatan siber di industri perbankan. Indra Utoyo, Ketua Bidang Operation, Technology, dan Regulatory Reporting Perbanas sekaligus Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank Rakyat Indonesia (BRI), menjelaskan bahwa saat ini bidangnya sudah memiliki inisiatif penanganan *cyber*



Transaksi dengan *mobile phone*; memiliki keamanan yang lemah

fraud dengan membentuk komite kerja *cyber security*, kolaborasi membangun *incident response team* di antara bank-bank anggota Perbanas yang bekerja sama dengan Bareskrim serta kementerian dan lembaga pemerintah lain yang terkait, serta forum *Chief Information Security Officer (CISO)*.

Selain itu, menurut Indra, diperlukan adanya *cross-collaboration* antara perusahaan telekomunikasi (yang diawasi Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia) dan industri keuangan digital (yang melibatkan institusi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) untuk membangun satu data *repository* dan *cross-industry regulation* yang mengatur irisan sektor telekomunikasi dan keuangan. Mengingat, saat ini nomor *handphone* telah menjadi fondasi hampir seluruh transaksi keuangan digital.

Tak hanya regulator, diperlukan juga kolaborasi lintas industri untuk membentuk inisiatif *shared blacklist repository*, termasuk *mobile number repository* yang akan sangat membantu pelaku industri dalam hal identifikasi dan *early warning system* kemungkinan *cyber fraud*.

“Meski saat ini sudah ada aturan yang mengatur terkait perlindungan nasabah, kami juga mendukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), yang tentu akan dapat mendorong industri lintas sektor untuk berbenah dalam pengelolaan dan perlindungan data *personally identifiable information (PII)* nasabah. Bagi perbankan dan pelaku industri, RUU PDP akan menciptakan kompetisi pasar yang lebih aman, tapi tetap menjaga spirit *open banking*,” kata Indra. ■

Indra Utoyo, Direktur Digital dan TI BRI dan Ketua Bidang Operation, Technology, dan Regulatory Reporting Perbanas

Perbanas Perangi Penjahat Siber

Di balik percepatan digitalisasi, rupanya ada ancaman kejahatan atau serangan siber atau *cyber crime* yang sangat besar. Perbanas sebagai asosiasi perbankan Indonesia telah menyiapkan langkah taktis untuk melindungi bank dari kejahatan siber. Berikut wawancara Tim *Probank* dengan Indra Utoyo, Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang juga Ketua Bidang Operation, Teknologi, dan Regulatory Reporting Perbanas. Indra menjelaskan langkah dan strategi Perbanas dalam memerangi penjahat siber. Seperti apa? Petikannya:

Pandemi mendorong meningkatnya transaksi digital di sektor perbankan. Bagaimana dengan kejahatan siber (*cyber crime*) sektor perbankan di Tanah Air? Meningkatkan atau tidak?

Tentu ada peningkatan. Seiring dengan meningkatnya transaksi digital, bank dan berbagai institusi keuangan juga banyak melakukan integrasi dengan pihak ketiga (baik melalui *application programming interface/API* maupun *partnership/konvergensi*), yang mengakibatkan meningkatnya eksposur akibat pemrosesan dan pertukaran data *PII (personally identifiable information)* nasabah oleh banyak pihak.

Selain itu, nomor *handphone* kini telah menjadi *backbone* untuk segala kegiatan transaksi digital. Hal ini membuat nomor *handphone* menjadi identitas yang paling penting, sehingga meningkatkan bahaya *SIM swap*, *number takeover*, bahkan *identity theft* jika nomor *handphone* dicuri.

Social engineering, di mana *illegal fintech* atau *illegal financial institutions* memanfaatkan celah keamanan nasabah terkait transaksi jasa keuangan menggunakan platform digital. Beberapa tantangan *cyber crime* lainnya yang dihadapi oleh sektor perbankan: *mobile devices*, kini jumlah pengguna dan jenis *mobile device* yang digunakan makin meningkat, sehingga sistem keamanan yang dibuat harus menjalani lebih banyak *testing* terhadap berbagai jenis *device*; dan tentunya berbagai potensi *fraud*, *phishing*, *hacking*, *malware/ransomware*, dan sebagainya.

Jika terus meningkat, apa langkah (*cyber security*) yang dilakukan Perbanas sebagai asosiasi industri perbankan di Indonesia untuk melindungi bank dari ancaman serangan kejahatan siber?



Saat ini Bidang Operation, Technology, dan Regulatory Reporting Perbanas sudah memiliki inisiatif penanganan *cyber fraud* dengan membentuk komite kerja *cyber security*, kolaborasi membangun *incident response team* di antara bank-bank anggota Perbanas yang bekerja sama dengan Bareskrim serta kementerian dan lembaga pemerintah lain yang terkait, serta forum *Chief Information Security Officer (CISO)*.

Perlu juga adanya *cross-collaboration* antara *telco* (Kominfo) dan keuangan digital (BI-OJK) untuk membangun satu data *repository* dan *cross-industry regulation* yang mengatur irisan sektor *telco* dan keuangan, mengingat saat ini nomor *handphone* telah menjadi fondasi hampir seluruh transaksi keuangan digital. Selain regulator, perlu ada kolaborasi lintas industri membentuk inisiatif *shared blacklist repository*, termasuk *mobile number repository* yang akan sangat membantu pelaku industri dalam identifikasi dan *early warning system* kemungkinan *cyber fraud*.

Meski saat ini sudah ada aturan yang mengatur perlindungan nasabah, kami juga mendukung RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi), yang tentu akan dapat mendorong industri lintas sektor untuk berbenah dalam pengelolaan dan perlindungan data *PII* nasabah. Bagi perbankan dan pelaku industri, RUU PDP akan mendorong inovasi dan menciptakan kompetisi pasar yang lebih aman tapi tetap menjaga spirit *open banking*.

Menurut Anda, apakah *cyber security* yang telah dilakukan bank saat ini sudah cukup berhasil? Jika sudah, mengapa masih terjadi pembobolan data atau kasus-kasus kejahatan siber di perbankan Indonesia sampai dengan saat ini? Apa yang perlu diperbaiki?

Dengan makin meningkatnya transaksi dan kolaborasi, tentu manajemen mitigasi risiko aktivitas transaksi digital juga

harus terus ditingkatkan. Saat ini antara *fraud (fintech illegal, internal fraud, etc)*, *financial crime (money laundering, etc)*, dan *cyber breaches (malware, otp scams, etc)* sudah makin jadi satu.

Beberapa *effort* yang dapat dilakukan untuk perlindungan nasabah adalah *mobile banking* dilengkapi *anti-root* dan *single device policy*, penggunaan *One Time Password (OTP)* dan token, adanya tim *CISO*, memperkuat *know your customer (KYC)* dan *know your employee (KYE)*, hingga membangun *perimeter security* dengan *multiple layer*.

KYC bisa dilakukan dengan menggabungkan berbagai modul *e-KYC*, seperti *optical character recognition (OCR)*, *liveness detection* (untuk mencegah *spoofing* dan *depfake*), *face matching* (pencocokan *selfie* dengan foto KTP), dipadukan dengan sistem *fraud detection* yang mampu memastikan dokumen adalah asli bukan manipulasi, *anti money laundering screening*, dan *risk engines* yang mampu mengelola profil risiko calon nasabah.

Langkah apa saja yang dilakukan Perbanas terkait masih lemahnya perlindungan data nasabah untuk mengatasi adanya hacker?

Hacker akan selalu ada dan menjadi *challenge* bagi siapa pun, terutama industri perbankan dan layanan keuangan, untuk dapat terus menutup celah-celah keamanan dari sistem yang dapat disusupi serangan-serangan mereka. Di komite kerja *cyber security*, kami secara proaktif melakukan *sharing* informasi isu *cyber security* terkini dan data terkait *blacklisting fraudster*, termasuk nomor *handphone* yang dipakai *fraudster* hingga nomor rekening, agar koordinasi penanganan *fraud* antarbank bisa dilakukan secepat mungkin.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membantu menyediakan platform yang menyimpan dan mengolah data *blacklisting* tersebut, serta membuka potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lintas industri, yang bertujuan untuk penanganan data *fraudulent*.

Tidak hanya terus melakukan perbaikan pada sistem dan menerapkan teknologi proteksi dan deteksi serangan, kami juga edukasi nasabah untuk meningkatkan *awareness* dan literasi terkait berbagai jenis *cyber crime* dan bagaimana menghindarinya, yang dilakukan terus-menerus melalui berbagai media (media sosial, iklan layanan masyarakat, dan sebagainya). Hal ini penting agar masyarakat secara aktif dapat mengetahui indikasi-indikasi *phishing*, percobaan *fraud*, hingga *social engineering*.

Transformasi digital juga membutuhkan tatanan institusi yang terkait dengan kebutuhan investasi teknologi informasi, budaya digital, serta sumber daya manusia (SDM). Bagaimana industri perbankan menyikapi kebutuhan tersebut?



Layanan perbankan; rawan kejahatan siber

Beberapa isu yang penting diperhatikan dalam transformasi digital untuk bisnis: *privacy* dan *cyber security*, organisasi yang *agile*, menumbuhkan *digital culture*, *capacity building digital talent*, dan *augmented intelligence* yang berbasis *customer-centric*.

Kita perlu membangun *new mindset*, *new practice*, dan *new competency*. *Mindset* yang perlu dibangun adalah *customer-obsessed*, kreatif, pengembangan produk yang berkelanjutan, bukan *by project*, dan *culture of ownership*. *Culture of ownership* juga akan membangun *mindset* di mana setiap orang akan ambil bagian dalam *decision making* seakan-akan mereka adalah pemilik produk dan bagian dari masalah.

Kemudian, membangun cara kerja baru (*new practice*) dengan menggunakan *design thinking* dan *empathy map* untuk lebih *customer-centric*, *agile sprint*, *DevSecOps*, *data-driven* dalam setiap *decision making*, dan *flexi working*. Serta,

berinvestasi pada pembangunan kapabilitas yang fokus ke kompetensi-kompetensi baru yang dibutuhkan dalam digital (e.g *open banking*, *PM*, *CX designer*, *AI specialist*, *data scientist*, *cybersecurity*, etc).

Anda optimistis ke depannya cyber security bank akan lebih baik?

Kita harus melihat ada *opportunity* dan manfaat besar dari digitalisasi. Tapi, kita tahu risikonya juga mengerikan dan besar. Jadi, kita harus terus lakukan pencegahan terbaik. Jangan sampai kita takut risikonya, dan akhirnya membuat kita tidak melakukan inovasi. Maka, kita coba mengambil manfaat dari ekonomi digital ini, tapi kita juga harus memitigasi risikonya dari digital ini semaksimal mungkin dengan meningkatkan *people*,

proses, dan teknologinya untuk makin baik, melakukan *cross collaboration* lintas sektor, kemudian menata regulasi lintas sektor sehingga kita lebih siap menghadapi kejahatan siber dengan lebih solid, terpadu, menyeluruh, karena ini musuh bersama dan kita harus bersama-sama menyatakan perang. ■

Kita harus melihat ada opportunity dan manfaat besar dari digitalisasi. Tapi, kita tahu risikonya juga mengerikan dan besar. Jadi, kita harus terus lakukan pencegahan terbaik. Jangan sampai kita takut risikonya, dan akhirnya membuat kita tidak melakukan inovasi.

Menakar Potensi Ekonomi Syariah Setelah Pemulihan Ekonomi 2022

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, industri halal digadang-gadang dapat menjadi sumber tenaga baru untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Di lain sisi, pengembangan industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari daya saing hingga permasalahan literasi dan inklusi.

Potensi ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air cukup menjanjikan. Meski terjadi pelemahan ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), industri halal tetap berkembang. Ekonomi dan keuangan syariah diperkirakan terus bertumbuh pada 2022 seiring dengan ekspektasi pemulihan situasi pandemi.

Data Bank Indonesia (BI) 2020 menunjukkan bahwa sektor prioritas rantai nilai halal atau *halal value chain (HVC)*, yang meliputi sektor pertanian, sektor makanan halal, sektor fesyen muslim, dan sektor pariwisata ramah muslim, berkontribusi 24,86% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Pangsa terhadap PDB itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 sektor prioritas rantai nilai halal berkontribusi 24,61%, kemudian meningkat menjadi 24,77% pada 2019.

Industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah Indonesia per September 2021 mencapai Rp646,20 triliun atau tumbuh 12,23% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan aset industri keuangan nonbank (IKNB) pada September 2021 tumbuh 5,73% dari Rp111,44 triliun pada September 2020 menjadi Rp117,83 triliun. Pertumbuhan fantastis di industri keuangan syariah terjadi di sektor pasar modal, khususnya saham syariah. Pada September 2021 kapitalisasi pasar saham syariah menurut



Fesyen muslim; menjadi sektor prioritas rantai nilai halal

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mencapai Rp3.595,74 triliun. Angka ini naik 22,89% dibandingkan dengan September 2020. Sedangkan reksa dana syariah turun 42,34% dari Rp71,65 triliun pada September 2020 menjadi Rp41,31 triliun pada September 2021.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan bahwa pada 2022 industri perbankan syariah diperkirakan melanjutkan pertumbuhan positif, baik dari sisi perhimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. “Di 2022, secara industri pembiayaan akan naik, terutama dengan pemulihan di sektor retail,” ujarnya.

Hal itu didorong oleh sejumlah faktor, antara lain membaiknya permintaan di sektor retail; pemulihan sektor industri manufaktur; fokus pada tujuh sektor prioritas pemerintah, yakni sektor kesehatan, sosial, energi, pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi (TI), dan pangan;

Perkembangan Industri Keuangan Syariah 2018 - 2021 (Rp Triliun)

NO.	INDUSTRI	2018	2019	Δ (%)	2020	Δ (%)	SEPT 2020	SEPT 2021	Δ (%)
1	Perbankan Syariah #)	489,70	538,30	9,92	608,90	13,12	575,80	646,20	12,23
2	Industri Keuangan Nonbank #)	96,76	106,02	9,57	116,19	9,60	111,44	117,83	5,73
3	Pasar Modal	3.723,20	3.828,38	2,82	3.449,65	-9,89	3.028,72	3.674,21	21,31
	- Reksa Dana Syariah *)	34,49	53,74	55,79	74,37	38,40	71,65	41,31	-42,34
	- Sukuk **)	22,02	29,83	35,44	30,35	1,76	31,14	37,16	19,35
	- Saham ***)	3.666,69	3.744,82	2,13	3.344,93	-10,68	2.925,94	3.595,74	22,89

Keterangan: - #) : aset; - *) : Nilai Aktiva Bersih; - **) : Nilai Akumulasi Penerbitan dan tidak termasuk Sukuk Negara; - ***) : Kapitalisasi pasar berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia; - Δ : pertumbuhan.
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank.

serta pertumbuhan industri halal, terutama *halal food* dan *halal cosmetic*. Kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah menjadi pendorong membaiknya kinerja perbankan syariah.

Kendati begitu, Banjaran

mengingatkan bahwa pengembangan industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan pada 2022. Hal itu tergambar dari sisi daya saing hingga permasalahan literasi dan inklusi bank syariah yang masih rendah.

Dari sisi jumlah, misalnya, keberadaan bank syariah di tengah masyarakat masih jauh tertinggal dari bank konvensional. Pada 2020 *share outlet* bank syariah terhadap bank umum baru 7,7%. “Artinya, dari 1 juta penduduk hanya dilayani oleh 9 kantor cabang dibandingkan sebanyak 114 kantor cabang bank umum,” ujarnya.

Tantangan juga terlihat dari tingkat literasi dan inklusi terhadap bank syariah yang masih rendah. Berdasarkan data BSI, literasi bank syariah hanya 8,9% dibandingkan dengan bank konvensional yang mencapai 37,7%. Adapun, tingkat inklusi bank syariah tercatat 9,1%, sementara bank konvensional mencapai 75,3%.

Makin maraknya “tren hijrah” di kalangan masyarakat saat pandemi ditengarai menjadi pendorong tumbuhnya ekonomi syariah. Studi yang dilakukan Inventure-Alvara menunjukkan bahwa akibat pandemi, sebanyak 58% masyarakat memilih lembaga keuangan prinsip syariah. Ini yang kemudian menjadi salah satu peluang yang disorot grup teknologi finansial PT Alami Fintek Sharia (ALAMI). Riset ALAMI juga menunjukkan bahwa sekitar 24% muslim di Indonesia merupakan *modern muslim* atau masuk kalangan hijrah, 16% muslim di Indonesia merupakan *highly devoted* atau sudah lama memiliki preferensi layanan serbasyariah, dan 60% masih terbuka terhadap layanan konvensional.

Chief Executive Officer (CEO) ALAMI, Dima Djani, mengungkapkan bahwa potensi tersebut mulai tampak dari berbagai indikator. Salah satunya dari pertumbuhan rekening tabungan perbankan syariah atau akun wadiah, yang tidak memberikan pembagian bunga seperti rekening perbankan konvensional. “Tren akun wadiah dari 2016 hanya US\$2,1 miliar, naik hampir US\$4 miliar pada 2018, sampai akhirnya tembus US\$6,5 miliar pada 2020. Terlihat naik signifikan, menandakan *demand* dari fenomena *hijrah lifestyle* itu sudah mulai tampak,” ujarnya.

Posisi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global (Berdasarkan Total Aset)

	 Keuangan Syariah	 Perbankan Syariah	 Asuransi Syariah	 Nonbank Syariah Lainnya	 Sukuk	 Reksa Dana Syariah
Ranking Global	#7	#10	#5	#10	#3	#5
Total Aset *)	99	38	3	1	57	3

Keterangan: *) : dalam US\$ miliar

Sumber: Islamic Finance Development Report 2020.



Sutan Emir Hidayat; harus sampai ke pasar global

Sutan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), menuturkan bahwa Indonesia punya potensi besar dalam ekonomi syariah, khususnya pada sektor industri halal. Sayangnya, kontribusi nilai ekspor produk halal Indonesia baru sekitar 3,8% dari total pasar produk halal dunia.

Sutan menambahkan, saat ini pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis agar Indonesia dapat menguasai pasar produk halal dunia. Antara lain, membangun kawasan industri halal terintegrasi, mempercepat proses penyelesaian sertifikasi halal, meningkatkan kontribusi produsen-produk halal, serta mengembangkan riset sains halal dan inovasi produk halal. Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai produsen dan eksportir produk halal dunia, diperlukan sinergitas antara industri halal dan keuangan syariah yang saling berkesinambungan.

“Pengembangan mata rantai industri halal atau *halal value chain* Indonesia harus sampai ke pasar global, serta dalam perjalanannya harus melibatkan seluruh pelaku ekonomi secara keseluruhan dari hulu ke hilir, khususnya sektor keuangan syariah,” tegas Sutan.

Berbagai kebijakan yang didorong pemerintah juga telah mengintegrasikan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah menjadi lebih baik. Beberapa regulasi yang diperkirakan akan memberikan dampak ke depan di antaranya undang-undang (UU) penguatan dan pengembangan sektor keuangan, peninjauan kembali kewajiban *spin off* bagi bank dan IKNB syariah, amandemen UU wakaf, dan kewajiban sertifikasi halal.

Lebih dari itu, agar mampu menjawab tantangan pada era sekarang, lembaga keuangan syariah dituntut untuk lebih adaptif dalam merespons digitalisasi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Inovasi produk dan layanan pun harus sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga menjadi lebih kompetitif. ■

Ekonomi Hijau, Butuh Komitmen dan Keseriusan

Kebutuhan investasi hijau saat ini masih cukup besar. Kontribusi antara regulator dan swasta dibutuhkan untuk menyukseskan transisi energi dan mendorong perekonomian hijau. Pembiayaan perbankan serta dukungan regulator memainkan peran vital.

Perekonomian hijau menjadi kunci bagi perbankan untuk terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Melihat perubahan iklim yang kian nyata, negara-negara maju pun mulai serius mengembangkan energi hijau dan terbarukan. Kondisi ini menuntut negara berkembang seperti Indonesia untuk mengurangi penggunaan energi yang kurang ramah lingkungan seperti batu bara dan minyak bumi.

Dalam beberapa tahun ke depan, transisi energi mengharuskan setiap sektor bisnis untuk ramah lingkungan. Perekonomian hijau dan keuangan berkelanjutan akan kian dibutuhkan sekaligus menjadi keharusan. Otomatis, kebutuhan investasi dan dana untuk melakukan transisi energi tidaklah sedikit. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat Indonesia setidaknya memerlukan Rp306 triliun untuk pembangunan rendah karbon. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menyokong 24% atau sebesar Rp72,22 triliun.



Unit pengolahan limbah; menjadi perhatian sektor perbankan

Tantangan dalam Pengembangan Keuangan Berkelanjutan



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Keterbatasan APBN dalam transisi energi membuat kontribusi pihak swasta dalam pembangunan perekonomian hijau menjadi penting. Ruang investasi hijau di sisi swasta masih terbuka lebar. Sebesar 76% atau Rp232,56 triliun investasi dari sektor swasta masih diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi hijau. Saat ini hanya 8% hingga 11% atau sebesar Rp25 triliun-Rp34 triliun yang baru terpenuhi, jadi kesenjangan antara kebutuhan dan suplai pembiayaan swasta ke sektor hijau masih cukup besar.

Melihat tingginya kebutuhan pembiayaan, sudah sepatutnya sektor perbankan meningkatkan dukungannya ke sektor hijau. Beberapa bank nasional mulai meresponsnya dengan berlomba-lomba meningkatkan penyaluran kreditnya ke sektor berkelanjutan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya, hingga kuartal ketiga 2021 sudah menyalurkan Rp607,7 triliun kredit ke sektor ramah lingkungan. Jumlah ini mencapai 65,3% dari jumlah portofolio BRI dan tercatat meningkat 9,1% *year on year* (yoy). Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) juga terus memperbesar portofolio penyaluran kredit hijau. Pada periode yang sama, berturut-turut kedua bank tersebut menyalurkan Rp187,4 triliun dan Rp140,5 triliun atau mencapai 23% dan 24,7% dari total portofolio kredit perbankan.

Tidak hanya bank pelat merah, bank swasta juga terus memperbesar penyaluran kreditnya ke sektor dan ekonomi hijau. Sebut saja Bank Central Asia (BCA) yang sudah menyalurkan kredit hijau sebesar Rp143,1 triliun dan CIMB

Niaga yang menyalurkan sebesar Rp44,03 triliun. Ini artinya, dukungan terhadap pembiayaan ekonomi hijau bakal tambah kuat dan bagus ke depannya.

Langkah dan Dukungan Regulator

Gayung bersambut, rupanya dukungan perbankan ke perekonomian hijau tidak lepas dari aksi kolaboratif regulator yang mendorong pembiayaan berkelanjutan di sektor keuangan. Dukungan-dukkungan ini juga mendapatkan pengakuan internasional, seperti World Wide Fund for Nature (WWF). Lembaga ini mengamini bahwa Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat untuk pengembangan ekonomi hijau. Dalam riset yang berjudul “Sustainable Financial Regulations and Central Banks Activities (SUSREG)”, Indonesia tercatat sudah memiliki aturan menyeluruh, baik dari sisi supervisi perbankan secara mikro maupun kebijakan moneter.

Dari sisi pengawasan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Aturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

“Indonesia telah menerapkan *good practices* pada POJK 51, yang meng-cover aspek iklim, lingkungan, dan sosial. Beberapa ruang *improvement*, misalnya cakupan aspek sosial yang lebih menyeluruh, kemudian fokus regulasi tidak hanya terbatas pada sisi *lending*, tetapi juga *products* dan *services* lainnya,” jelas Kepala Bagian Keuangan Berkelanjutan WWF Indonesia, Rizkiasari Yudawinata, dalam sebuah *webinar* yang diselenggarakan pada Desember 2021.

Selain POJK 51 Tahun 2017, OJK sudah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang saat ini sudah memasuki tahap kedua. *Roadmap* ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi sektor jasa keuangan dan rujukan untuk kementerian/lembaga terkait dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif pembiayaan hijau.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) berkontribusi dalam penerapan keuangan berkelanjutan dari sisi



Destry Damayanti; akan melanjutkan kebijakan

makro. Salah satu perwujudannya ialah dengan melakukan pengalokasian investasi berkelanjutan dalam bentuk penempatan portofolio cadangan devisa hijau. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan, ke depan, BI akan terus melanjutkan kebijakan penguatan ekonomi hijau untuk menjaga stabilitas dan memitigasi risiko pada sistem keuangan.

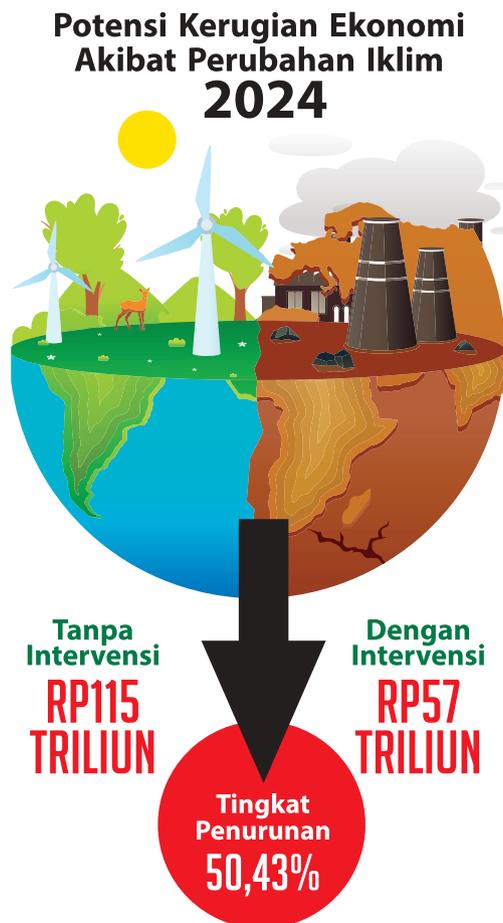
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia juga menerbitkan berbagai aturan yang pro dengan transisi energi hijau, seperti pajak karbon.

Kemenkeu akan menerapkan tarif Rp30 per kilogram karbondioksida bagi sektor usaha yang menimbulkan jumlah emisi karbon melebihi ketentuan. Aturan ini bertujuan untuk mendorong pelaku ekonomi agar beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Pada tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di 1 April 2022 nanti.

Selain memperkuat regulasi dalam negeri, pemerintah memanfaatkan momentum Presidensi G20 untuk mendorong

aksi nyata dalam perekonomian hijau. Topik mengenai perubahan iklim dan ekonomi hijau akan menjadi salah satu agenda penting yang akan didiskusikan dengan negara-negara lain. Pemerintah meyakini, perkembangan pada perekonomian hijau memerlukan campur tangan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Untuk itu, setiap negara perlu bergandengan tangan dalam pengembangan ekonomi hijau dan pulih secara bersama-sama. Filosofi inilah yang mendasari tema yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia, yaitu “*Recover Together, Recover Stronger*”.

Perlu ditegaskan, pengembangan perekonomian hijau masih memerlukan dukungan dan pembiayaan, baik dari investasi internasional, APBN, maupun perbankan. Pengembangan teknologi dan tenaga ahli juga masih menjadi tantangan. Meskipun demikian, sektor keuangan diharapkan mampu menjadi katalisator dari transisi energi dan ekonomi hijau melalui berbagai pembiayaan ke sektor ramah lingkungan. Dengan demikian, tren ini bisa terus berkembang dan mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik. ■



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Desember 2021.

Merancang Organisasi Masa Depan

Bertahan dalam situasi yang berubah begitu cepat dan penuh ketidakpastian memang bukan hal yang mudah. Semua perusahaan atau organisasi tentu ingin bisa bertahan, bahkan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Apa saja yang perlu dilakukan supaya menjadi perusahaan atau organisasi masa depan?

“*Accept every change as an opportunity, not a threat*”. Kalimat bijak itu seharusnya menjadi mantra semua orang di dunia saat ini. Pandemi menyebabkan banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan. Kecil kemungkinan kehidupan akan kembali seperti sebelum pandemi. Dan, sebagian orang bisa beradaptasi dengan mudah atas perubahan ini, tapi sebagian lainnya bisa jadi sangat sulit dan butuh waktu lama untuk menerima perubahan.

Dalam setiap era sejatinya selalu ada perubahan. Agar mampu bertahan, dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Perubahan gaya hidup masyarakat karena pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bukan terjadi secara tiba-tiba. Sekitar sepuluh tahun lalu, fasilitas digital sudah dikenal masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat sudah sangat bergantung pada kemudahan teknologi. Pandemi makin meningkatkan ketergantungan manusia pada teknologi karena aturan kesehatan yang memaksa masyarakat untuk mengurangi interaksi antarmanusia.

Perubahan dalam aspek kehidupan membawa konsekuensi bahwa manusia sebagai individu harus beradaptasi. Hal ini bukan hanya berlaku bagi individu. Organisasi, terutama organisasi bisnis yang berorientasi pada profit, juga harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Ignasius Jonan, *senior banker* yang pernah dipercaya menjadi menteri pada beberapa periode kepresidenan di Indonesia, menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang menjadi acuan organisasi untuk menjadi organisasi masa depan. Yakni, merumuskan tujuan (*purpose*), menentukan prinsip (*principle*), dan kemauan untuk berubah (*moving forward*).

Purpose Perusahaan

Organisasi atau perusahaan yang bisa bertahan, menurut Jonan, harus bisa merumuskan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan terkait dengan memahami kebutuhannya, mengetahui keunikan yang dimilikinya (*competitive advantage*), memiliki *economic value*, serta mampu mendeteksi *passion* yang dimiliki orang-orang yang ada di perusahaan. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak nilai kehidupan yang berubah. “Bila saat ini satu negara dikatakan maju dengan melihat angka *gross domestic product (GDP)*-



Ruang kerja satu perusahaan; didominasi generasi milenial

nya, bisa jadi kriteria ini akan berubah,” ungkap Jonan.

Demikian pula halnya dengan *passion* karyawan. Dunia kerja yang saat ini didominasi generasi Z dan generasi milenial, sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu yang banyak diisi generasi Y dan generasi X.

Prinsip Perusahaan

Setelah perusahaan atau organisasi bisa merumuskan tujuannya, mereka juga harus memahami tiga prinsip penting supaya menjadi perusahaan yang *survive* pada era mendatang. Ketiga prinsip itu adalah berorientasi pada pelanggan, transformasi digital, dan kepemimpinan (*leadership*).

Pada era sebelumnya, perusahaan harus mengintip apa yang dilakukan pesaing untuk memenangkan pasar. Cara seperti itu sudah tidak dapat lagi diterapkan pada masa sekarang. Perusahaan harus bisa memenuhi apa yang diinginkan konsumen. Dalam bisnis perbankan, misalnya. Sektor ini harus bisa menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ada generasi tertentu yang masih menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Sementara, generasi milenial sudah meninggalkannya. Mereka memilih menggunakan fasilitas yang tersedia di *mobile phone* sebagai sarana pembayaran.

Transformasi digital menjadi sebuah keharusan atau *mandatory* bagi perusahaan saat ini guna mempercepat proses

bisnis dan memberi kemudahan bagi konsumen. Tentu saja ini terkait dengan *culture* perusahaan. Bank yang sebelumnya memberikan layanan konvensional kemudian bertransformasi ke arah digital, tentu berbeda dengan bank yang sejak awal sudah berbasis digital. Ada proses perubahan budaya pada bank pertama.

Kajian McKinsey & Company menyatakan bahwa di beberapa perusahaan yang berhasil, budaya menjadi tulang punggung yang memengaruhi kesehatan dan energi yang berkelanjutan bagi perusahaan. Perusahaan dengan budaya kerja yang kuat memberikan keuntungan tiga kali lebih besar kepada *shareholder* dibandingkan dengan perusahaan tanpa budaya kerja yang baik.

Proses transformasi bisa dilakukan secara bertahap. Kerja keras dengan menyelesaikan permasalahan *one by one* menjadi tahapan yang mesti dilalui dalam proses ini. Peran *stakeholder* sangat penting dalam proses transformasi. Dukungan seluruh *stakeholders* sangat dibutuhkan supaya transformasi berjalan mulus. “Visi dan *planning* perusahaan harus dikomunikasikan dengan baik kepada *stakeholder*,” ujar Jonan.

Satu hal penting yang dibutuhkan perusahaan di tengah kondisi yang tak pasti adalah *leadership*. Menurut Agus D.W. Martowardojo, *senior banker* dan anggota Dewan Kehormatan Perbanas 2020–2024, agar perusahaan berhasil melewati kondisi yang tidak normal ini, dibutuhkan kepemimpinan yang



Agus D.W. Martowardojo;
membaca tanda-tanda sejak awal

mampu menangani krisis dan mengerti bagaimana cara keluar dari kesulitan. “Kemampuan membaca tanda-tanda dari awal itu sangat berguna untuk bisa melakukan antisipasi dan reaksi dengan cepat,” tambahnya.

Kemauan Berubah

Banyak fenomena alam yang menyebabkan manusia harus mengubah konsep hidupnya. Pandemi COVID-19 mengingatkan manusia untuk mengubah perilaku hidupnya. Perubahan iklim (*climate change*) memaksa manusia untuk lebih mempertimbangkan kondisi alam ketika berkegiatan. Bakal berkurangnya sumber energi berbasis fosil memaksa manusia untuk memikirkan sumber energi

terbarukan lainnya.

Perubahan alam pun menuntut organisasi atau perusahaan mempertimbangkan tiga hal dalam menjalankan bisnisnya, yakni *environmental*, *social*, dan *governance*. Isu lingkungan (*environmental*) menjadi tanggung jawab semua organisasi atau perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam, meminimalkan polusi dan sampah, serta peduli pada pelestarian keanekaragaman hayati.

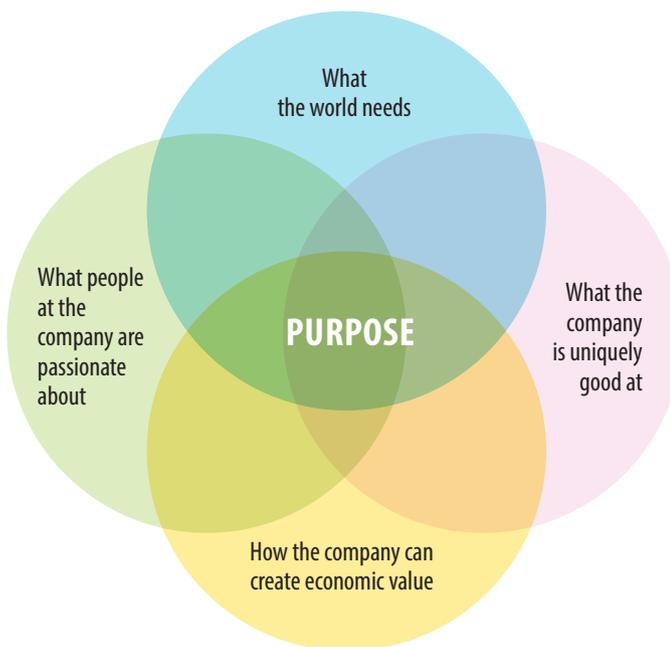
Sementara, aspek sosial terkait dengan kepedulian hak-hak asasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam aspek tata kelola (*governance*), yang harus diperhatikan organisasi atau perusahaan adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau *GCG*) dengan mencegah terjadinya korupsi serta menjunjung tinggi etika bisnis. Menurut Agus Martowardojo, penerapan *GCG* menjadi landasan penerapan *performance management* yang baik dan organisasi berbasis kinerja dengan sistem evaluasi berkala. Dari sini perusahaan akan memiliki *human capital* yang mampu mengeksekusi pemikiran *leader*.

Perubahan besar memang telah terjadi di dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada 2011 perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam, seperti ExxonMobil, PetroChina, Royal Dutch Shell, dan Chevron Corporation, masuk dalam daftar sepuluh perusahaan terbesar di dunia. Namun, sepuluh tahun kemudian (2021), perusahaan-perusahaan itu tergeser oleh perusahaan berbasis teknologi. Pergeseran yang terjadi dalam sepuluh tahun itu bisa menjadi panduan bahwa perubahan terjadi dengan begitu cepat.

Pada era yang penuh ketidakpastian, *skill* dibutuhkan agar bisa bertahan, setidaknya dalam menghadapi masa pandemi ini. Namun, perlu diingat bahwa setiap era pasti menghadapi situasi disrupti. Jadi, bukan hanya *skill* yang harus di-*upgrade*, tetapi juga karakter. Karakter harus lebih fleksibel. Bisa menerima perubahan yang dihadapi sebagai sebuah kesempatan, bukan sebagai ancaman. ■

Looking for Your Company's Purpose



Source: The Heart of Business by Hubert Joly (Harvard Business Review)

Agar Lebih Melek dan Cerdas Berkeuangan

Minimnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia membuat peran sektor keuangan dalam pembangunan ekonomi belum optimal. OJK menerbitkan panduan bagi pelaku usaha jasa keuangan dan *stakeholder*-nya dalam membangun pemahaman masyarakat bertransaksi keuangan.

Pemulihan ekonomi nasional saat ini sangat membutuhkan peran sektor keuangan, terutama perbankan. Untuk itu, diharapkan adanya keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan. Sebab, tingkat literasi dan inklusi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 menunjukkan, indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Meski masih terbelakang, angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan survei pada 2016 yang menunjukkan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan berturut-turut sebesar 29,7% dan 67,8%.

Masih rendahnya indeks literasi keuangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat atas produk dan layanan yang ditawarkan lembaga jasa keuangan masih rendah. Mengapa literasi keuangan menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi? Literasi keuangan menjadi modal utama untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, perlindungan konsumen, serta penajaman inklusi keuangan yang berujung pada pembangunan perekonomian.

“Edukasi dan literasi keuangan merupakan kemampuan dasar yang penting dan wajib dimiliki setiap individu agar lebih melek dan cerdas berkeuangan yang pada akhirnya bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional,” ujar Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, pada 20 Desember 2021 OJK meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. SNLKI ini disusun berdasarkan tiga pilar, yaitu cakap keuangan, sikap dan

Tujuan Pengembangan LMS

- Mempermudah kegiatan belajar dan pelaksanaan pelatihan literasi keuangan;
- Memperluas akses peserta terhadap sarana dan prasarana edukasi dalam meningkatkan literasi keuangan;
- Mempercepat proses pembelajaran literasi keuangan;
- Memetakan tingkat pemahaman materi literasi keuangan.



Transaksi keuangan; indeks literasi masih rendah

perilaku keuangan yang bijak, serta akses keuangan. Pada 2013 OJK sudah merilis SNLKI dan merevisinya pada 2017. Untuk lebih menyempurnakannya, OJK menerbitkan SNLKI 2021-2025. Menurut Tirta, SNLKI ini akan menjadi pedoman bagi OJK, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program edukasi dan literasi keuangan.

Selain SNLKI 2021-2025, OJK merilis Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan dan buku *Saku Literasi Keuangan* bagi calon pengantin. Ketiga instrumen ini menjadi infrastruktur untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Pengembangan LMS merupakan strategi pengembangan literasi secara *offline* dan *online* dengan mempertimbangkan tantangan geografis dan demografis. Dalam pelaksanaannya, LMS akan bekerja sama dengan beberapa institusi untuk meningkatkan edukasi finansial masyarakat secara *online*.

Sedangkan, buku *Saku Literasi Keuangan* bagi calon pengantin diharapkan bisa memberikan literasi kepada calon pengantin agar mereka bisa mengelola dan mengambil keputusan keuangan dengan tepat. Pada 14 Desember 2021 buku ini sudah disosialisasikan kepada 200 penghulu melalui kegiatan *Trainers of Trainers (ToT)* bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Banten. Kegiatan ini akan dilanjutkan kepada pemuka agama lainnya yang ada di Indonesia. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH BUT. MUFG BANK, LTD. TAHUN 2021

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU PPh Nomor 36/2008 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini BUT. MUFG BANK, LTD. mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2021 sebagai berikut:

NAMA	NPWP	JUMLAH
PT. U Finance Indonesia	01.711.027.1-073.000	Rp.643.629.083.812



Jaga Momentum, Restrukturisasi Kredit Diperpanjang

Program restrukturisasi kredit resmi diperpanjang OJK hingga Maret 2023. Pelaku perbankan menyambut baik hal itu dan diharapkan dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Hampir dua tahun pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menekan perekonomian dan dunia usaha di dalam negeri. Termasuk di dalamnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan, tak sedikit yang sampai gulung tikar. Berbagai upaya pun dilakukan para pelaku usaha agar tetap dapat bertahan. Pemerintah juga tidak tinggal diam.

Ketika pertama kali pandemi masuk Indonesia pada 2 Maret 2020 dan pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan, muncul kekhawatiran di masyarakat, terutama para pelaku usaha. Sebab, hal itu pastinya akan berpengaruh pada omzet bisnis mereka. Di lain pihak, bank waswas karena menurunnya omzet bisnis pelaku usaha bisa berpengaruh pada kemampuan membayar cicilan pinjaman/kredit bagi mereka yang punya pinjaman ke bank. Dan, hal yang dikhawatirkan itu memang menjadi kenyataan. Ekonomi dalam negeri sempat terpuruk, walau akhirnya perlahan mulai bangkit.

Untuk menstabilkan sektor keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.11/POJK.03/2020.

POJK tersebut mengatur relaksasi atas restrukturisasi kredit perbankan. Restrukturisasi kredit sendiri diartikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dalam konteks ini akibat pandemi. Dapat dikatakan, restrukturisasi kredit adalah keringanan yang diberikan oleh pihak bank (kreditur) agar debitur bisa melunasi utangnya.

Restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam pemberian atau untuk mendapatkan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi debitur. Persyaratannya yaitu debitur yang benar-benar mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, serta debitur yang memiliki prospek usaha cerah dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Sejauh ini program restrukturisasi kredit perbankan terbukti membantu para debitur yang terdampak pandemi, dan mereka



Perajin UMKM; sebagian besar terdampak pandemi

bisa bangkit. Jumlah debitur yang sudah kembali normal menjalankan kewajibannya juga terus meningkat. Sementara, debitur yang tidak terselamatkan dengan program ini jumlahnya masih terbilang kecil.

Merujuk catatan OJK, jumlah kredit yang turun menjadi *non performing loan (NPL)* per Oktober 2021 dari total kredit restrukturisasi COVID-19 tidak lebih dari 5%. Restrukturisasi kredit perbankan juga tercatat sudah melandai, hingga Oktober 2021 menjadi Rp714,01 triliun, sebelumnya mencapai Rp738,60 triliun per September 2021. Jumlah debiturnya pun menurun menjadi 4,4 juta debitur per Oktober 2021. Data terbaru November 2021 malah menunjukkan restrukturisasi kredit perbankan kian melandai menjadi Rp693,62 triliun, dengan jumlah debitur menjadi 4,2 juta.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, mengatakan, kebijakan stimulus perekonomian yang dikeluarkan regulator mendapat respons sangat positif dari para pelaku usaha dan industri perbankan. “Penurunan jumlah kredit yang direstrukturisasi menunjukkan telah membaiknya kondisi pelaku usaha seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional,” katanya.

OJK akan terus menjaga stabilitas dan kinerja industri perbankan guna menghadapi tantangan ke depan. Khususnya perkembangan ekonomi global yang makin dinamis, pesatnya transformasi digital, dan dampak pandemi yang masih belum usai.

Heru menambahkan, strategi kebijakan yang telah disusun OJK tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan dari

pemerintah, lembaga otoritas lain, pelaku usaha, dan industri keuangan. “Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat untuk membangun optimisme baru guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” tambahnya, dalam keterangan resmi, medio November 2021.

Meski restrukturisasi kredit perbankan terus menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, perpanjangan masa kebijakan ini terus berlanjut. Sedianya, program restrukturisasi kredit akan berakhir pada Maret 2022. Namun, pada pertengahan September 2021 OJK memutuskan untuk memperpanjang program ini hingga Maret 2023. Keputusan ini tertuang dalam dua POJK, yakni POJK No.17/POJK.03/2021 untuk bank umum dan POJK No.18/POJK.03/2021 untuk bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Keputusan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan serta mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, mengungkapkan, program restrukturisasi kredit yang telah dikeluarkan sejak awal 2020 sangat membantu perbankan dan para debitur, termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum tersebut dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran COVID-19, maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kredit diperpanjang hingga 2023.

“Perpanjangan kebijakan *countercyclical* sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan,” ujar Wimboh.

Perpanjangan periode relaksasi ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan dan mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional, serta mempersiapkan bank dan debitur untuk kembali normal secara perlahan sehingga menghindari potensi gejolak usai kebijakan ini berakhir.



Wimboh Santoso; langkah antisipatif dan lanjutan

Respons Perbankan

Perpanjangan periode restrukturisasi kredit ini tentunya disambut baik pelaku industri perbankan. Bank Negara Indonesia (BNI), misalnya. Direktur Manajemen Risiko BNI, David Pirzada, berujar, perpanjangan restrukturisasi kredit ini dapat membantu untuk terus menjaga kinerja debitur yang masih terdampak pandemi. Ia memerinci, profil risiko dari *outstanding* restrukturisasi kredit saat ini sebesar 60% masuk kategori *medium risk* sehingga masih membutuhkan waktu untuk kembali normal. Sementara, untuk debitur yang sudah *recover* kembali normal tercatat mencapai 6% dari total restrukturisasi COVID-19.

“Debitur restrukturisasi COVID-19 yang *downgrade* ke *NPL* hanya 1%. Itu didominasi oleh sektor industri perdagangan, restoran, hotel, dan industri pengolahan,” ujarnya.

Per November 2021, lanjut David, *outstanding* restrukturisasi kredit yang terdampak COVID-19 di BNI sudah turun 20% dibandingkan dengan akhir 2020 yang mencapai Rp102 triliun. BNI sendiri telah mengalokasikan pencadangan khusus untuk restrukturisasi kredit sebesar 11%, meningkat dari Desember 2020 yang hanya 5%.

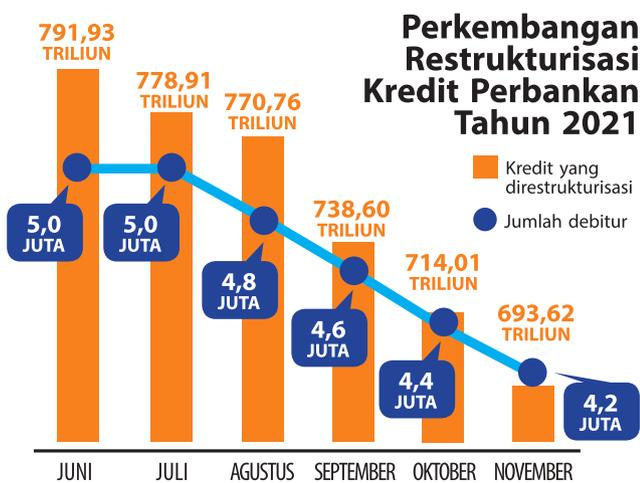
Setali tiga uang, Bank Mandiri juga mencatatkan penurunan total *outstanding* restrukturisasi kredit dari Rp93,3 triliun pada akhir 2020 menjadi Rp90,1 triliun pada September 2021. Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri, Ahmad Siddik Badruddin, mengungkapkan, penurunan nilai restrukturisasi ini didukung dengan makin membaiknya kondisi pandemi sehingga debitur juga telah mengalami *recovery* bisnis atau melunasi pinjamannya.

“Tren restrukturisasi sampai September 2021, portofolionya telah turun sebesar Rp6,4 triliun menjadi Rp90,1 triliun dibanding Juni 2021. Penurunan ini disebabkan karena sudah melunasi pembayaran atau mencicil pembayarannya karena sudah *recover*,” ungkapnya dalam konferensi pers, Oktober 2021.

Hingga September 2021, nilai restrukturisasi kredit Bank Mandiri mayoritas masih didominasi oleh segmen non-UMKM dengan nilai Rp69,3 triliun, sementara segmen UMKM menyumbang Rp20,8 triliun.

Sementara itu, pemain besar di sektor UMKM, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), menilai program restrukturisasi kredit sangat membantu perbankan maupun pelaku usaha. Hingga November 2021, tren restrukturisasi kredit di bank berkode emiten BBRI ini juga terus melandai.

Direktur Utama BRI, Sunarso, mengatakan, restrukturisasi kredit nasabah terdampak COVID-19 hingga November 2021 sebesar Rp159 triliun, yang diberikan kepada 2,1 juta debitur. “Tingkat keberhasilannya yang kami restrukturisasi, yang jatuh *NPL* hanya 5,84%. Artinya, tingkat kesuksesan restrukturisasi 94,16%. Ini membanggakan,” katanya. ■



Hubungan Dagang Indonesia-Nigeria: Dari Minyak Bumi hingga "Indomie"

Beragam komoditas diperdagangkan antara Indonesia dan Nigeria. Kerja sama ekonomi antardua negara ini makin terlihat intens. Sudah ada beberapa perusahaan dari Indonesia yang melakukan investasi di negara yang terletak di pantai barat Afrika ini.

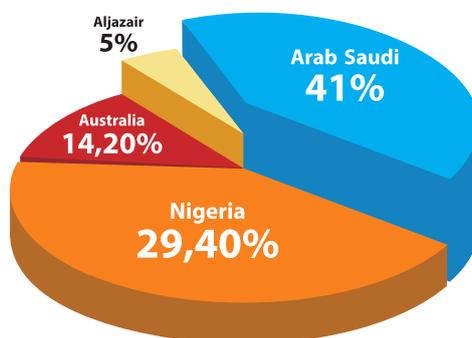
Bila Anda di Indonesia saat ini sedang menikmati semangkuk mi instan, bisa jadi pada saat yang sama sebagian warga Nigeria juga sedang melahap salah satu makanan favorit orang Indonesia itu, bahkan sebagian masyarakat dunia. *Kok bisa?* Ya, salah satu produsen mi instan yang cukup terkenal di Indonesia memang sudah melakukan investasi di negara yang terletak di pantai barat Afrika itu. Jadi, mi instan produksi Indonesia sudah biasa dikonsumsi warga sana.

Hubungan antara Indonesia dan Nigeria yang pertama kali dilakukan pada 1965 memang kental dengan kepentingan ekonomi. Hubungan ini ditandai dengan pembukaan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lagos pada 1965. Nigeria kemudian membalasnya dengan membuka kantor kedutaannya di Jakarta pada 1976. Pada 2001 Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melakukan kunjungan ke Nigeria sebagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi antarkedua negara. Kunjungan ini dilakukan saat Gus Dur menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing 8 Countries (D8) di Qatar.

Hubungan kedua negara terus berlanjut. Saat berlangsung KTT D8 di Bali pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui langsung Presiden Nigeria, HE Olusegun Obasanjo. Dalam pertemuannya, dua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya untuk sektor energi seperti minyak. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada awal 2013 diadakan Misi Dagang Indonesia ke Nigeria yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY diikuti rombongan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Nigeria.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hubungan Indonesia dengan negara berpenduduk 211 juta ini terus berlanjut. Pada 12 April 2021 Usra Hendra Harahap, Duta Besar Indonesia untuk Nigeria, melakukan audiensi dengan Geoffrey Onyeama, Menteri Luar Negeri Nigeria. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan berbagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral yang selama ini sudah terbangun.

Pangsa Impor Minyak Mentah ke Indonesia



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Dibahas pula upaya me-review dan menghidupkan kembali berbagai *memorandum of understanding (MOU)* yang pernah diterapkan sebelumnya melalui pelaksanaan Sidang Komisi Bersama (SKB), seperti *MOU* di bidang kerja sama migas, kontra terorisme, pemuda dan olahraga, pendidikan dan kebudayaan, serta bidang perikanan dan pertanian. Bahkan, Indonesia dan Nigeria saat ini tengah mengupayakan tercapainya penandatanganan *Letter of Intent (LOI)* terkait kerja sama pertahanan dan kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, yang drafnya masih dikaji oleh otoritas terkait di Nigeria.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Nigeria sepakat untuk me-review kembali *MOU* maupun *pending issues* yang masih relevan untuk pengembangan kerja sama bilateral kedua negara saat ini. Khusus untuk sektor migas, Geoffrey Onyeama mendukung untuk dilaksanakan melalui skema *government to government (GtoG)*, mengingat produk impor di Indonesia dari Nigeria didominasi sektor tersebut. "Saya juga sepakat dengan pandangan Duta Besar untuk dapat menghidupkan kembali pelaksanaan SKB antara Indonesia dengan Nigeria yang terakhir dilaksanakan di Jakarta pada 2013," ujar Geoffrey seperti dikutip dari siaran resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Di bidang perdagangan, Indonesia maupun Nigeria berpandangan sama bahwa kedua negara belum mencapai potensi yang sesungguhnya untuk volume perdagangan. Tercatat, pada 2019, volume perdagangan kedua negara mencapai US\$2,34 miliar, dan masih didominasi oleh sektor migas. Kedua negara pun berharap terjadi peningkatan nilai perdagangan bilateral dalam beberapa tahun ke depan, khususnya untuk produk-produk selain migas.

Dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan kedua negara, Duta Besar Indonesia untuk Nigeria telah meminta dukungan Kementerian Luar Negeri Nigeria untuk membentuk *Preferential Trade Agreement (PTA)* sebagai langkah untuk menghilangkan hambatan tarif dan nontarif. Sebagai informasi, sejumlah produk Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi ke Nigeria, di antaranya minyak kelapa



Audiensi Indonesia dengan Nigeria;
mempererat hubungan bilateral

sawit sebesar 35%, produk kertas 20%, bumbu makanan 20%, lilin dan sabun 35%, serta produk mebel atau furnitur sebesar 20%. Tentunya pengurangan tarif bea masuk akan sangat membantu peningkatan nilai perdagangan kedua negara.

Pihak Nigeria juga berterima kasih kepada Indonesia atas berbagai beasiswa yang diberikan kepada para pemuda Nigeria, dan berharap akan ada lebih banyak lagi beasiswa yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada pemuda Nigeria melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.

Nigeria menjadi negara mitra dagang terbesar dari kawasan Afrika Sub-Sahara bagi Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara mencapai US\$1,5 miliar pada 2016. Nigeria yang merupakan produsen minyak terbesar keenam di dunia, dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pasar minyak di Amerika Serikat (AS) dengan menjadi produsen minyak bumi

terbesar kedua setelah Arab Saudi di AS itu, diyakini dapat memenuhi kebutuhan minyak bumi Indonesia. Nigeria pun banyak mendapatkan keuntungan dari hubungan bilateral ini.

Potensi Investasi

Nigeria menjadi destinasi utama investasi Indonesia di Afrika dan sudah sekitar 14 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara tersebut. Sejumlah produk Tanah Air, seperti mi instan, ban radial, serta berbagai produk farmasi dan herbal, memiliki popularitas tinggi di Nigeria. Bahkan, menurut laporan Kantor WorldPanel yang dirilis pada 2017, produk mi instan "Indomie" menjadi salah satu *brand* makanan favorit dan menguasai 74% pangsa pasar mi di Nigeria. Produk "Indomie" pertama kali diekspor ke Nigeria pada 1988.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020, Indonesia telah mengimpor komoditas minyak bumi beserta hasilnya dari Nigeria sebanyak 2,3 juta ton. Impor minyak terbanyak dari Nigeria ke Indonesia tercatat pada 2002 dengan total impor sebanyak 5,6 juta ton. Kalau dilihat berdasarkan neraca perdagangan, pada 2020, nilai impor yang telah dilakukan Indonesia dari Nigeria sebesar US\$830,7 juta. Sedangkan, ekspor yang telah dilakukan Indonesia ke Nigeria sebesar US\$371 juta. Ke depan, Indonesia dan Nigeria sepakat akan mengembangkan lagi hubungan bilateral hingga luar sektor migas. Duta Besar RI untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, telah menegaskan pentingnya memelihara dan mengembangkan hubungan bilateral kedua negara untuk menghadapi tantangan regional saat ini. ■

Turut Mempercantik Wanita Nigeria

Sepertinya tidak ada wanita yang tidak ingin tampil cantik dan menawan. Bulu mata lentik, rambut panjang terurai, tentunya menjadi dambaan kaum hawa. Dan, semua itu bisa diwujudkan, bahkan dalam waktu singkat. Bulu mata yang kurang menarik, bisa diganti dengan bulu mata palsu. Atau, rambut dirasa kurang panjang terurai, tinggal pasang *hair extension*. Gampang. Tidak perlu repot bertahun-tahun memanjangkan rambut.

Obsesi wanita untuk tampil lebih menarik ini pun dimanfaatkan para perajin bulu mata palsu, rambut palsu, dan *hair extension* asal Purbalingga, Jawa Tengah. Tidak hanya pasar dalam negeri, produk perajin Purbalingga juga sudah merambah pasar luar negeri. Potensi di Nigeria pun terbuka lebar. Pada 2020 penduduk wanita Nigeria mencapai 101 juta jiwa. Melihat angka populasi ini, peluang pasar

produk kecantikan cukup bagus di negara berbentuk republik federal dengan 36 negara bagian ini.

Menurut Hendro Jonathan, Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Lagos, sebanyak 70% wanita Nigeria berusia di atas 17 tahun menggunakan bulu mata palsu, rambut palsu, dan *hair extension* dalam kehidupan sehari-hari. "Kami mengajak produsen dan eksportir bulu mata, rambut palsu, dan *hair extension* untuk memanfaatkan peluang pasar ini," ajaknya.

Pada 2020 Nigeria mengimpor produk bulu mata,

rambut palsu, dan *hair extension* hingga mencapai nilai US\$573 juta. Dari nilai tersebut, impor dari Indonesia untuk produk-produk tersebut baru mencapai US\$295.000. Keunggulan produk bulu mata, rambut palsu, dan *hair extension* dari Purbalingga adalah bahan bakunya yang dari rambut asli, tentunya dengan kualitas yang tidak perlu diragukan.



Lagos, Nigeria; destinasi utama investasi Indonesia di Afrika

Jalan Pintas Menuju Transformasi Digital

Untuk menciptakan industri perbankan yang lebih kompetitif, regulator merilis peraturan tentang bank umum dan produknya pada Juli 2021. Peraturan ini sesuai dengan kebutuhan bank dan masyarakat yang sudah beralih ke layanan digital.

Munculnya pemain baru di industri jasa keuangan dengan beragam *platform* menimbulkan pertanyaan, apakah bank masih ada, apakah bank masih dibutuhkan. Melihat prinsip dasar bisnis bank, yakni sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, seperti bank akan tetap ada, bank akan tetap dibutuhkan. Hanya saja, dalam kegiatan operasionalnya, bank harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Sekarang adalah era digitalisasi, dan kecepatan dalam pelayanan menjadi salah satu hal wajib yang harus dilakukan pelaku industri jasa keuangan seperti bank. Tuntutan supaya bank bisa memberikan layanan yang cepat mendorong pelaku industri sektor ini bertransformasi ke layanan digital. Generasi milenial, yang saat ini mendominasi layanan jasa keuangan, lebih memilih layanan digital saat bertransaksi ketimbang layanan fisik di kantor cabang. Pengaruh kaum milenial ini sangat besar. Mereka bisa mengajak generasi yang lebih senior dan tidak lekat dengan teknologi untuk beralih ke layanan digital.

Penetrasi internet di Indonesia meningkat selama Januari 2020 hingga Januari 2021. Pada Januari 2020 penetrasi penggunaan internet mencapai 64%. Angkanya naik menjadi 73,7% pada Januari 2021. Angka penggunaan internet yang diperkirakan akan terus meningkat ini berdampak pada terciptanya *digital economy* di Indonesia. *Digital economy* di Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih dari dua kali pada 2025 dengan mayoritas penggunaannya mengakses *mobile phone*.

Industri perbankan yang menjadi sentral kegiatan perekonomian di Tanah Air mendapat perhatian dari regulator. Untuk meningkatkan daya saing dan bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli 2021 merilis Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Secara garis besar, dua peraturan ini isinya mengenai pendirian bank umum, ketentuan permodalan, bank digital, kantor cabang dan kantor perwakilan bank yang ada di luar negeri, serta penyelenggaraan produk bank dan pengelolaan risikonya.

Beleid ini menjadi *guidance* yang jelas bagi seluruh



Deretan kantor bank; harus bertransformasi

pemangku kepentingan industri perbankan. Selain ketentuan mendirikan bank baru, ada aturan mengenai bank digital. Dalam beberapa tahun terakhir muncul entitas bisnis yang memperkenalkan diri sebagai bank digital. Sesuai dengan POJK tadi, yang disebut bank digital adalah bank yang berbadan hukum Indonesia (BHI), menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Sebagian bank digital yang meramaikan industri perbankan di Tanah Air awalnya merupakan bank umum konvensional. Oleh pemilik barunya, bank tersebut ditransformasikan menjadi bank yang *fully digital*. Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK, mengatakan bahwa OJK belum mengeluarkan lisensi baru bank *fully digital* kepada perusahaan. Dengan syarat permodalan sebesar Rp10 triliun untuk pendirian bank baru, kecil kemungkinan ada yang memilih mendirikan bank baru. Kalau ada bank yang berniat *fully digital*, diarahkan untuk memilih bank yang sudah ada karena pengelolaan dan *risk management* yang sudah jelas.

Meski ada istilah bank digital di peraturan tadi, OJK tidak membedakan antara bank yang memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank *incumbent*, maupun bank yang benar-benar baru didirikan sebagai bank yang *fully digital*. Bagaimanapun, bank tetaplah bank. "Bank is bank," ungkap Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Produk Bank Umum

Meningkatnya kebutuhan layanan digital di industri keuangan tidak lantas disikapi semua pelaku industri perbankan dengan mengubah sistem layanan mereka ke *fully digital*. Sebagian bank masih mempertahankan layanan fisiknya. Meskipun, di saat pandemi, mereka menutup sebagian besar kantor cabangnya. Haru Koesmahargyo, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), meyakini bahwa penggunaan gadget belum merata di seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, layanan kantor cabang masih diperlukan.

Untuk meng-cover kebutuhan layanan yang serbacepat, sebagian bank di Tanah Air sudah menyediakan layanan digital selain layanan fisik di kantor cabang. Bank-bank yang menyediakan layanan digital mengaku mendapatkan respons yang sangat baik dari nasabahnya. Timothy Utama, *Managing Director* Bank Mandiri, mengakui *new user* yang menggunakan layanan digital *Livin' by* Bank Mandiri meningkat dua kali lipat setiap bulannya. Layanan digital juga memudahkan bank sebagai sentral transaksi keuangan untuk membangun *digital economy community*.

Tujuan OJK mengulirkan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 sejalan dengan produk-produk bank umum yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang. OJK mempercepat proses perizinan penyelenggaraan produk bank dan mengedepankan manajemen risikonya. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa produk bank terbagi menjadi produk bank dasar dan produk bank lanjutan.

Produk bank dasar terdiri atas produk, layanan dan/atau jasa yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta kegiatan sederhana lain. Sedangkan, produk bank lanjutan merupakan pengembangan dari produk dasar dengan beberapa pengembangan seperti berbasis teknologi dan berkaitan dengan kegiatan lembaga jasa keuangan lain. Untuk bank-bank yang akan mengembangkan produknya, OJK mempermudah proses pengajuannya. Regulasi ini menjadi cermin bahwa regulator sangat memberikan kemudahan bagi bank untuk mengembangkan dan mentransformasi produknya sesuai dengan kebutuhan zaman. Tentu saja ada sanksi yang harus diterima bila bank tidak mematuhi ketentuan yang sudah digariskan.

Dalam peraturan tersebut, OJK menekankan pentingnya pengelolaan risiko terkait dengan pengembangan produk perbankan. Pengelolaan risiko sangat berkaitan dengan reputasi bank. Karena itu, bank harus benar-benar memperhatikan unsur risiko ini. Transformasi ke arah digital, baik dalam bentuk produk maupun layanan, bagi perbankan adalah sebuah keharusan di zaman sekarang. Namun, Indra Utoyo, Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengatakan, bukan karena faktor digital orang percaya untuk menempatkan dananya di satu bank. "Digital tidak bisa menggantikan *trust, brand, dan service*. Akan tetapi, tanpa digital, kita tidak bisa mendapatkan tiga hal tadi," katanya. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Sesuai Pasal 6 ayat (1) Huruf h UU PPh No.36 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut:

Tahun 2021

Rp2.516.064.541.151,00

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2021 sebagai Lampiran.

Menyelaraskan dengan Praktik Bisnis Internasional

OJK mengeluarkan peraturan baru terkait dengan manajemen risiko bank umum syariah. Melalui POJK ini, diharapkan tercipta integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang sejalan dengan *roadmap* perbankan syariah Indonesia 2020-2025.

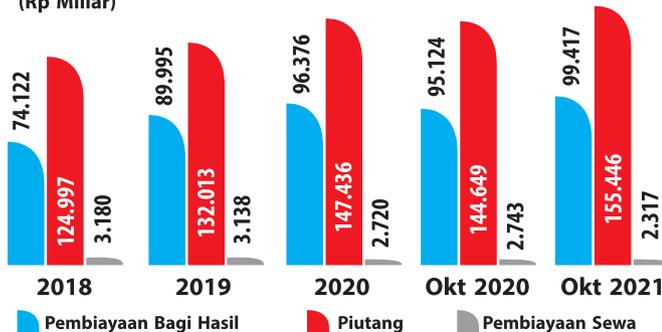
Industri perbankan syariah nasional menorehkan rapor biru di tengah kondisi yang penuh tantangan di masa pandemi. Bahkan, dari sisi pembiayaan dan pendanaan, industri perbankan syariah tumbuh lebih kencang dibandingkan dengan industri perbankan konvensional.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per kuartal ketiga 2021 pembiayaan perbankan syariah nasional tumbuh 12,24% secara tahunan. Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah pun tumbuh di angka yang memuaskan, yakni 9,42%. Angka ini jauh di atas capaian perbankan konvensional, yang kredit dan DPK-nya masing-masing tumbuh 2,21% dan 7,69%.

Derasnya pembiayaan di industri perbankan syariah tetap harus dibarengi dengan manajemen risiko yang mumpuni. Sebagai upaya penyempurnaan kerangka manajemen risiko bank umum syariah (BUS) dalam mengelola risiko yang selaras dengan *international best practice* dan arah pengembangan nasional, per akhir Januari 2021 OJK mengeluarkan aturan baru mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi BUS. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah (BMPD BUS).

Dalam POJK tersebut, yang dimaksud penyaluran dana besar adalah penyaluran dana kepada individu atau kelompok selain pihak terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti. Selanjutnya, batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Sedangkan, kepada selain pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 25% dari modal inti (*tier 1*) bank.

Pembiayaan Syariah BUS 2018 - 2021
(Rp Miliar)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Layanan bank umum syariah; sesuai standar internasional.

POJK BMPD BUS sekaligus mencabut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/13/PBI/2006 dan POJK Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa.

POJK yang akan berlaku pada 1 Januari 2022 ini menyesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah, khususnya dalam penggunaan instrumen keuangan syariah. POJK ini juga membuka ruang sinergi yang lebih luas antara BUS dan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, seperti penyaluran dana kepada organisasi sosial, penyaluran dana untuk pembangunan kawasan industri halal, dan penyaluran dana dalam rangka mendukung program pemerintah yang dijamin oleh asuransi syariah. Selain itu, ketentuan ini merupakan harmonisasi dengan ketentuan terkini lainnya, antara lain ketentuan di perbankan konvensional, ketentuan mengenai manajemen risiko konsolidasi, dan ketentuan mengenai pelaporan.

Dengan hadirnya kebijakan baru ini, diharapkan tercipta integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih masif dan kontributif dalam mendukung pembangunan nasional yang sejalan dengan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. ■



bersama membangun Indonesia

LAKU PANDAI
Salingkat Masyarakat
Membantu orang lain untuk lebih baik bersama



Jakarta **BANK DKI**
kota kolaborasi

PENDAFTARAN AGEN
<https://agen.bankdki.co.id>

JakOne Abank

AGEN BANK DKI



Yuk, tingkatkan bisnismu bersama Bank DKI dengan gabung menjadi JakOne Abank!

“Layanan Transaksi Perbankan Tanpa Kantor Yang Hadir Lebih Dekat, Lengkap, Mudah, Dan Aman”

Melayani Transaksi :

- ✔ Setor & Tarik Tunai
- ✔ Transfer
- ✔ Bayar Tagihan
- ✔ Pulsa
- ✔ Kuota Internet
- ✔ TV Kabel
- ✔ Bayar Retribusi
- ✔ Tiket Transportasi

Info lengkap scan disini :



atau klik:
bit.ly/jakoneabank



www.bankdki.co.id
www.bankdkisyariah.co.id

Bank_DKI

bank_dki

bank.dki

Bank DKI merupakan peserta pengaminan LPS



PT Bank DKI adalah pelaku jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan